

Pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan provinsi-provinsi di pulau Jawa

Ratiarum Fatika Yoertiara, Nur Feriyanto*

Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author: nur.feriyanto@uui.ac.id

JEL Classification Code:

M30, M32, N41

Kata kunci:

ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, data panel, *fixed effect*.

Email penulis:

yoetiara12@gmail.com
nur.feriyanto@uui.ac.id

DOI:

10.20885/JKEK.vol1.iss1.art9

Abstract

Purpose – The purpose of this research is to find out the effect of economy development, Human Development Index, and Degree of Open Unemployment, in regards to the disparity of income in 6 provinces in the island of Java in the 2012-2015 period.

Methods – This research uses data panel from 2012-2021 period in 6 provinces in Java.

Findings – The result of this research shows that the variables of economic development doesn't affect the disparity of income significantly. The Human Development Index (IPM) shows negative effect and significance in regards to the disparity of income, while the Degree of Open unemployment variables affect positively and significantly towards the disparity of income.

Implication – Improvement on working skills for job seekers, opening more job vacancy for employers, and regional government's actions are needed in order to improve regional quality which in turn will decrease the disparity of income in various regions across Java.

Originality – This research analyzes the factors that affect the disparity of income in various provinces in Java.

Abstrak

Tujuan – Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap ketimpangan pendapatan 6 Provinsi di Pulau Jawa dalam periode 2012-2021.

Metode – Penelitian ini menggunakan data panel periode 2012 hingga 2021 pada 6 Provinsi di Pulau Jawa.

Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Variabel IPM menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan variabel TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

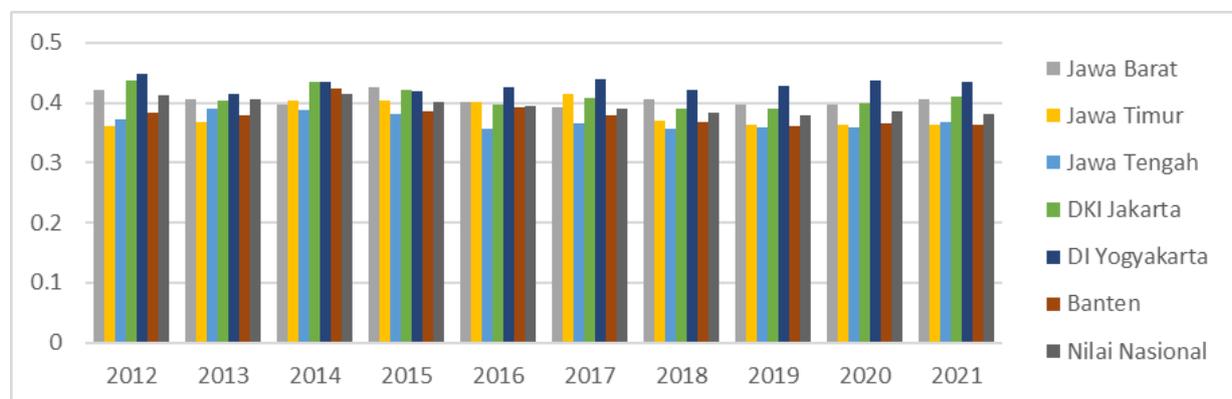
Implikasi – Diperlukan peningkatan keterampilan kerja bagi pencari kerja atau pengusaha agar dapat membuka lapangan kerja serta peran pemerintah daerah akan sangat penting dalam membentuk kualitas daerah yang pada akhirnya dapat menurunkan ketimpangan pendapatan di berbagai daerah di Pulau Jawa.

Orisinalitas – Penelitian ini menganalisis faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan di provinsi yang ada di Pulau Jawa.

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses untuk mengembangkan kegiatan ekonomi di suatu negara, yang menyebabkan pendapatan per kapita meningkat sehingga tercapai tingkat kemakmuran yang tinggi. Pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak terlepas dari adanya masalah terkait dengan pembangunan, yaitu adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Menurut World Bank (2015), terdapat empat penyebab ketimpangan di Indonesia, yaitu pertama adanya ketimpangan peluang yang dirasakan oleh keluarga miskin karena dari awal tidak adanya kesempatan adil dalam hidup. Kedua, tidak meratanya pekerjaan, pekerja yang memiliki keterampilan lebih akan mendapatkan gaji lebih tinggi. Tidak adanya keterampilan membuat pekerja terjebak dalam pekerja informal dengan produktivitas yang rendah. Ketiga, perbedaan konsentrasi kekayaan. Masyarakat yang memiliki banyak asset akan mendorong ketimpangan saat ini atau masa yang akan datang. Keempat, saat terjadi guncangan, dampak yang terjadi akan lebih terasa pada masyarakat miskin dan akhirnya kemampuan untuk mendapatkan pendapatan akan menurun.

Untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan penduduk suatu wilayah digunakan indeks Gini. Nilai rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai rasio Gini mendekati 1 menunjukkan suatu daerah memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi, sedangkan nilai rasio Gini mendekati 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan (BPS, 2022). Di Indonesia, Provinsi yang terdapat di Pulau Jawa memiliki rasio Gini yang terbilang cukup tinggi. Menurut BPS, Provinsi di Pulau Jawa memiliki nilai ketimpangan pendapatan di atas angka nasional (Arzaqi & Astuti, 2020). Menurut data di SIMREG Bappenas (2020) pada tahun 2018 hingga tahun 2020 Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta memiliki rasio Gini di atas nilai nasional. Nilai rasio gini nasional tahun 2018 sebesar 0,384 sedangkan nilai rasio Gini Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 sebesar 0,39 dan nilai yang paling tinggi tahun 2018 pada Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,422.



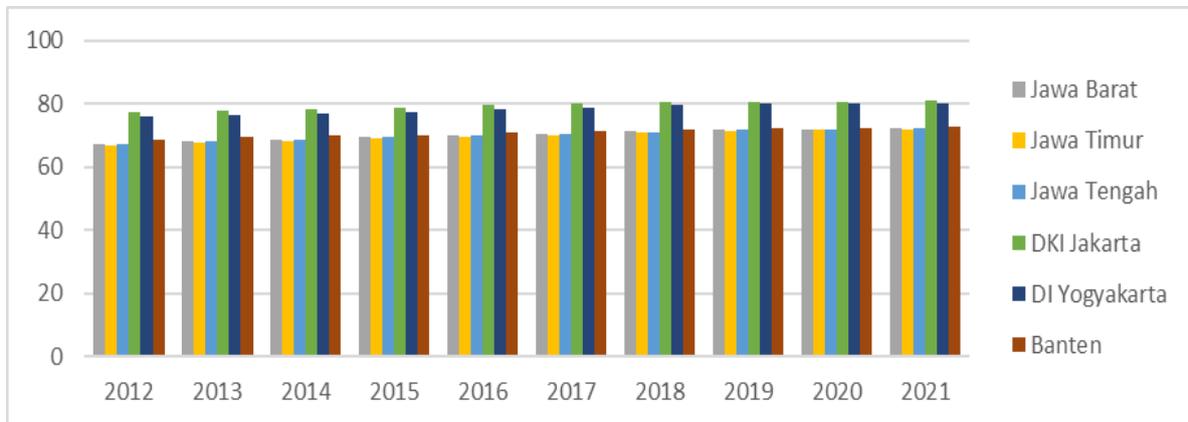
Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2012-2021

Gambar 1. Rasio Gini Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2012-2021

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kualitas masyarakat digunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu pada bidang kesehatan berupa umur harapan hidup, pendidikan berupa harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta standar hidup layak. Semakin tinggi IPM maka semakin tinggi produktivitas penduduk sehingga tingkat pendapatan akan semakin tinggi, sebaliknya jika IPM rendah maka produktivitas akan rendah dan akan berpengaruh pada pendapatan.

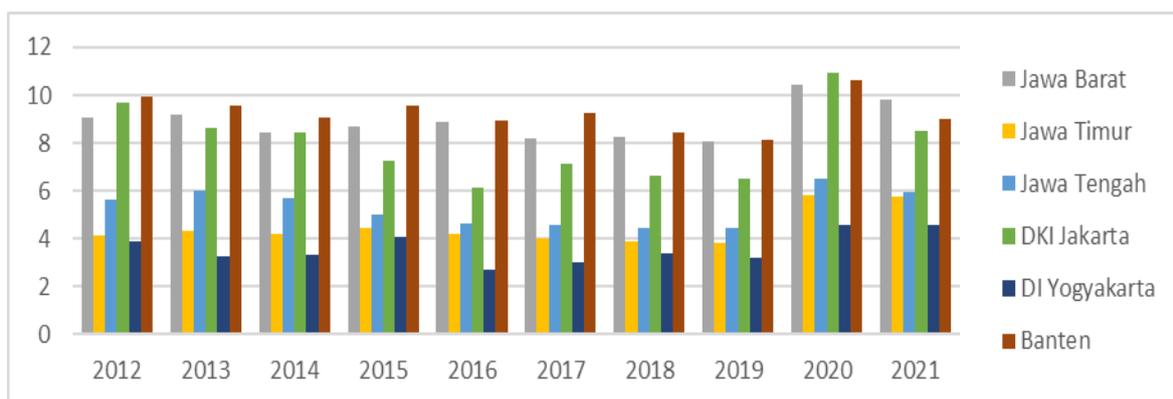
Ketimpangan pendapatan juga dapat terjadi jika tingkat pengangguran di suatu wilayah tinggi. Masalah pengangguran merupakan salah satu masalah yang terjadi di negara sedang berkembang. Tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan seseorang tidak dapat menerima pendapatan atau upah sehingga terjadi pelebaran kesenjangan antara penduduk kaya dan penduduk miskin. Berdasarkan Gambar 2, diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka yang tinggi berada

di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 paling tinggi pada Provinsi DKI Jakarta sebesar 10,95 persen karena akibat dari pandemi covid-19. Provinsi DI Yogyakarta memiliki tingkat pengangguran terbuka yang cenderung rendah daripada Provinsi lainnya di Pulau Jawa.



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2012-2021

Gambar 3. IPM Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2012-2021



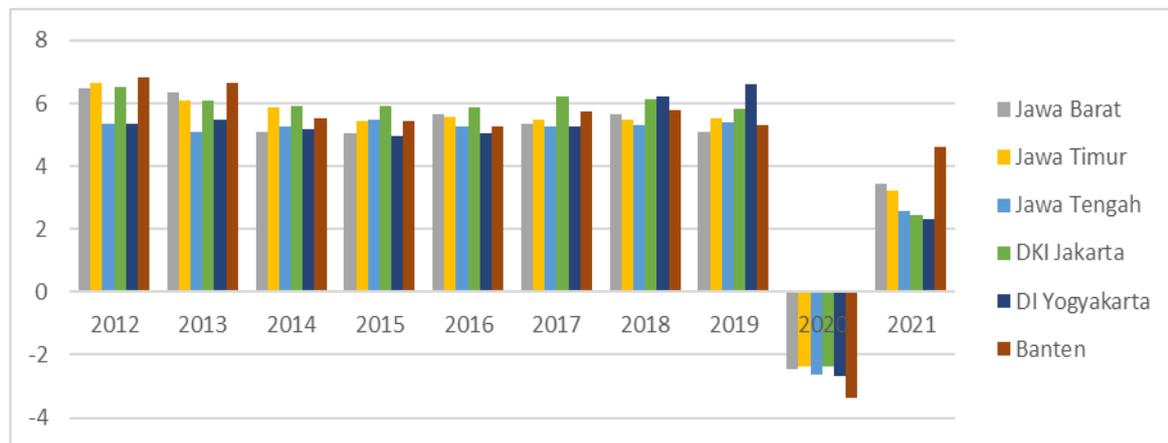
Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2012-2021

Gambar 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) di Pulau Jawa Tahun 2012-2021

Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang baik di suatu negara atau daerah menunjukkan keadaan masyarakat yang baik dan sejahtera. Ketimpangan pendapatan antargolongan masyarakat dan ketimpangan antarwilayah maju dan yang tertinggal dapat disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi (BPS DIY & Bappeda DIY, 2020). Berdasarkan Gambar 4, pertumbuhan yang paling rendah terjadi pada tahun 2020 karena terdapat pandemi covid-19. Pandemi menyebabkan perekonomian melemah yang ditandai oleh penurunan daya beli, tingkat kemiskinan yang meningkat, adanya ketidakpastian yang membuat tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai negatif di semua Provinsi di Pulau Jawa. Tahun 2021, pandemi covid-19 memang belum berakhir, tetapi pada tahun 2021 triwulan 3 tingkat pertumbuhan ekonomi sudah menunjukkan angka positif. Provinsi Banten tahun 2021 yang bergerak positif sebesar 4,62 persen dan sudah mencapai target dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebesar 4,5 persen- 5,5 persen (KEMENKO Perekonomian, 2020), sedangkan Provinsi lain selain Provinsi Banten pada tahun 2021 tingkat pertumbuhan ekonomi belum mencapai target dalam RKP.

Penelitian Hartini (2017) dilakukan pada antar daerah di Provinsi DI. Yogyakarta tahun 2011-2015 dengan hasil penelitian menunjukkan variabel PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sementara IPM dan investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi DI. Yogyakarta. Penelitian Istiqamah et al. (2018) dilakukan di 34 Provinsi di Indonesia tahun 2010-2016

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Korimah & Yuniasih (2019) melakukan penelitian Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2011-2017 dengan hasil penelitian yaitu variabel tingkat pengangguran terbuka dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Variabel desentralisasi fiskal dan IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2012-2021

Gambar 5. Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2012-2021

Febrianto (2017) melakukan penelitian di Provinsi Jawa Timur dengan periode penelitian tahun 2011-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Jawa Timur. Penelitian Rosa & Sovita (2016) yang dilakukan pada 6 Provinsi di Pulau Jawa dengan periode penelitian tahun 2009-2015 menghasilkan PDRB per kapita, populasi penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Variabel derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian Alamanda (2021) dilakukan di 50 negara pada tahun 2000-2018 dengan klasifikasi negara yaitu negara berpendapatan tinggi, negara berpendapatan menengah, dan negara berpendapatan rendah dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan, sementara rasio pajak berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

Menurut Syita (2017) di negara berkembang, ketimpangan relatif lebih tinggi karena saat proses pembangunan awal dimulai, daerah dengan kondisi yang lebih baik akan mendapat kesempatan dan peluang untuk membangun daerahnya lebih awal, sedangkan pada daerah yang tertinggal tidak dapat kesempatan untuk mengawali pembangunan karena adanya keterbatasan sarana prasarana, sumber daya alam, serta sumber daya manusia. Pradnyadewi & Purbadharmaja (2017) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menyebabkan ketimpangan pendapatan meningkat karena pendapatan tinggi akan tercipta di wilayah yang memiliki faktor produksi lebih banyak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang ada pada suatu daerah dan akan membantu dalam pembangunan daerah. Tingkat pendidikan yang tinggi mencerminkan kemampuan yang tinggi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi, memiliki kualitas yang lebih baik daripada yang memiliki pendidikan rendah, sehingga semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, produktivitas kerja juga akan semakin meningkat dan pada akhirnya akan mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan tinggi atau menghasilkan output yang tinggi. Oleh karena itu, semakin baiknya kualitas sumber daya manusia akan mendorong kesejahteraan manusia dan memiliki peluang tidak terjerumus dalam kemiskinan.

Mengukur kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, karena berkaitan dengan pemerataan pendapatan (Putra, 2018). Tingkat pengangguran terbuka yang cenderung tinggi membuktikan bahwa pendapatan dan kesejahteraan masyarakat masih rendah. Tingkat pengangguran terbuka dapat menunjukkan seberapa besar kemampuan ekonomi dalam menyediakan lapangan kerja sehingga mampu menyerap persediaan tenaga kerja yang tersedia. Semakin tinggi nilai tingkat pengangguran terbuka, maka semakin banyak tenaga kerja yang belum memiliki pekerjaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data panel yaitu gabungan antara data *time series* dan data *cross section* dengan periode 2012 hingga 2021 pada 6 Provinsi di Pulau Jawa, sehingga total observasi sebanyak 60. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistik (BPS) dan Sistem Informasi dan Manajemen Data Dasar Regional (SIMREG) Bappenas. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap ketimpangan pendapatan di 6 Provinsi Pulau Jawa.

Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel yang merupakan gabungan antara data *time series* dengan data *cross section*. Menurut Widarjono (2018) kelebihan menggunakan data panel adalah mampu menyediakan data yang lebih banyak serta dapat menggabungkan informasi antara data *time series* dan *cross section*. Dalam melakukan analisis digunakan alat untuk olah data berupa Eviews. Model persamaan estimasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$\text{Gini_Ratio} = \beta_0 + \beta_1\text{PE}_{it} + \beta_2\text{IPM}_{it} + \beta_3\text{TPT}_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

- Gini_Ratio : Gini ratio
 β_0 : Konstanta
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien masing-masing variabel
 PE : Pertumbuhan Ekonomi (%)
 IPM : Indeks Pembangunan Manusia
 TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
 e : error
 i : Provinsi
 t : Periode tahun 2012-2021

Hasil dan Pembahasan

Penelitian dilakukan tahun 2012 hingga 2021 dengan jumlah observasi sebesar 60. Model data panel yang digunakan adalah *fixed effect*.

Tabel 1. Hasil Uji Chow

	<i>Statistic</i>
<i>Cross-section F</i>	17,431
<i>Cross-section Chi-square</i>	59,794

Diketahui nilai F-statistik sebesar 17,43 dan nilai F-tabel yang diperoleh dari tabel distribusi F dengan tingkat signifikansi 5 persen sebesar 2,40. Nilai F-statistik menunjukkan lebih besar dari nilai F-tabel sehingga menolak H_0 , artinya model yang dipilih adalah model *fixed effect*.

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	9.862145	3	0.0198

Diketahui nilai statistik chi-square Hausman cross-section random sebesar 9,862 dengan *degree of freedom* (df) sebesar 3 dan nilai pada alpha 5 persen adalah 7,81. Dari hasil olah data, nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritis maka dalam uji hausman model yang dipilih adalah *fixed effect*.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik

Variabel	Koefisien	Std.error	T-stat.	Prob.
C	0,548336	0,130760	4,19	0,000
PE	0,001733	0,001226	1,41	0,163
IPM	-0,002742	0,001580	-1,73	0,088
TPT	0,006166	0,003147	1,95	0,055
R-squared = 0,744041				
Prob(F-statistic) = 0,000				

$$\text{Gini_Ratio} = \beta_0 + \beta_1 \text{PE}_{it} + \beta_2 \text{IPM}_{it} + \beta_3 \text{TPT}_{it} + e_{it}$$

$$\text{Gini_Ratio} = 0,548336 + 0,001733 \text{ PE} - 0,002742 \text{ IPM} + 0,006166 \text{ TPT}$$

Uji F

Berdasarkan hasil olah data menggunakan Eviews dalam penelitian ini, diperoleh nilai F-statistik sebesar 0,000 lebih kecil dari alpha 5 persen maka menolak H0 sehingga variabel independen yang terdiri dari PE, IPM, dan TPT berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu rasio gini secara bersama-sama.

Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil regresi, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,744 atau 74,4 persen artinya variabel rasio gini dapat dijelaskan dalam variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka. Sedangkan sisanya sebesar 25,6 persen dapat dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Pembahasan

Berdasarkan hasil olah data, variabel PE menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,163. Untuk menunjukkan uji 1 sisi, maka nilai probabilitas dibagi 2 sehingga nilai probabilitas sebesar 0,08 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 dan nilai t_{hitung} sebesar 1,41 < t_{tabel} sebesar 1,672 maka menerima H0. Dari hasil estimasi *fixed effect* diketahui koefisien variabel PE sebesar 0,001733 dengan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, sehingga naik atau turunnya pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi-Provinsi Pulau Jawa tahun 2012-2021. Artinya, meskipun rata-rata pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa sebesar 4,5 persen tetapi hasil pembangunan ekonomi cukup dapat terdistribusi dengan baik pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa.

Berdasarkan hasil olah data, variabel IPM menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,088. Untuk menunjukkan uji 1 sisi, maka nilai probabilitas dibagi 2 sehingga nilai probabilitas sebesar 0,04 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 dan nilai t_{hitung} sebesar -1,73 > t_{tabel} sebesar -1,672 maka menolak H0. Dari hasil estimasi *fixed effect* diketahui koefisien variabel IPM sebesar -0,002742 yang artinya apabila indeks pembangunan manusia naik sebesar 1 satuan maka nilai ketimpangan pendapatan akan turun sebesar 0,002742 dengan asumsi variabel lain tetap.

Syamsir & Rahman (2018) menjelaskan bahwa menurut UNDP, pembangunan manusia berpusat pada manusia yang membuat manusia menjadi tujuan akhir dari pembangunan nasional, sehingga manusia bukan merupakan alat untuk mewujudkan pembangunan nasional. Penelitian yang dilakukan oleh Alvan (2007) menjelaskan bahwa apabila ingin mendapatkan tingkat PDB dan pendapatan per kapita yang tinggi serta tingkat ketimpangan yang rendah, maka sebaiknya indeks pembangunan manusia dijadikan hal utama dalam pembangunan suatu daerah maupun negara.

Indeks Pembangunan Manusia memiliki indikator kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Apabila seseorang dapat mengakses pendidikan yang tinggi, maka lebih besar pula pengetahuan dan keahlian yang dimiliki sehingga produktivitas kerja akan semakin tinggi dan pada akhirnya mendapatkan pendapatan yang tinggi.

Berdasarkan hasil olah data, variabel TPT menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,05. Untuk menunjukkan uji 1 sisi, maka nilai probabilitas dibagi 2 sehingga nilai probabilitas sebesar 0,02 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 dan nilai t_{hitung} sebesar 1,95 > t_{tabel} sebesar 1,672 maka menolak H_0 . Dari hasil estimasi *fixed effect* diketahui koefisien variabel TPT sebesar 0,006166 yang artinya apabila tingkat pengangguran terbuka naik sebesar 1 persen maka nilai ketimpangan pendapatan akan naik sebesar 0,006166 dengan asumsi variabel lain tetap.

Pertambahan penduduk yang tinggi atau terjadinya urbanisasi menimbulkan masalah bagi suatu daerah. Masalah akan lebih parah jika pertambahan penduduk dibarengi dengan tingginya tingkat pengangguran. Banyaknya masyarakat yang pindah dari desa ke kota dengan tujuan untuk mencari pekerjaan, tetapi tidak memiliki bekal untuk memperoleh pekerjaan yang baik, maka hal itu akan membuat masyarakat terserap ke pekerjaan sektor informal yang cenderung memiliki upah rendah.

Tabel 4. Koefisien intersep dari ketimpangan pendapatan provinsi-provinsi di Pulau Jawa

Provinsi	Koefisien C	Effect	Hasil
Jawa Timur	0,548336	-0,006743	0,541593
Jawa Tengah	0,548336	-0,023454	0,524882
Jawa Barat	0,548336	-0,016490	0,531846
DKI Jakarta	0,548336	0,017880	0,566216
DI Yogyakarta	0,548336	0,071711	0,620047
Banten	0,548336	-0,042905	0,505431

Berdasarkan tabel di atas, diketahui koefisien intersep tertinggi berada di Provinsi DI. Yogyakarta yang artinya ketimpangan pendapatan di Provinsi DI Yogyakarta tertinggi di Pulau Jawa dengan koefisien intersep sebesar 0,620047. Menurut ekonom INDEF Bhima Yudhistira, ketimpangan di Provinsi DI. Yogyakarta disebabkan karena meningkatnya pembangunan pusat perbelanjaan dan hotel yang memfasilitasi kelompok menengah ke atas, sedangkan untuk kelompok ekonomi menengah ke bawah tidak merubah gaya hidupnya yang sederhana (Zuhriyah, 2017). Provinsi Banten menjadi Provinsi yang ketimpangan pendapatannya rendah dibanding Provinsi lain di Pulau Jawa dengan koefisien intersep sebesar 0,505431. Berkembangnya kawasan industri di Provinsi Banten diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja di sekitar kawasan industri maupun di wilayah Banten sendiri.

Kesimpulan dan Implikasi

Berdasarkan hasil yang didapatkan menunjukkan, variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Pulau Jawa. Hal ini dimungkinkan karena pengawasan distribusi hasil pembangunan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Jawa relatif baik, sehingga tidak berdampak pada ketimpangan pendapatan.

Variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Pulau Jawa. Kemudahan dalam mengakses pendidikan dan kesehatan serta meratanya kualitas pendidikan maupun kesehatan di berbagai daerah di Pulau Jawa akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Saat pendidikan dapat dicapai oleh semua orang, maka peluang untuk mendapatkan pekerjaan akan terbuka karena adanya pengetahuan dan kualitas dalam diri seseorang yang akhirnya akan mendapatkan penghasilan yang tinggi.

Variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Pulau Jawa. Tingginya tingkat pengangguran terbuka pada daerah di Pulau Jawa menandakan bahwa masih banyak tenaga kerja yang belum mendapatkan kesempatan untuk bekerja serta tidak memiliki produktivitas kerja sehingga tidak memperoleh upah

atau pendapatan. Seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan akan mengakibatkan ketimpangan pendapatan di suatu wilayah semakin melebar.

Peningkatan keterampilan kerja dengan memberikan pelatihan kepada pencari kerja atau pengusaha agar dapat membuka lapangan kerja serta memberikan insentif kepada pengusaha untuk memberikan pelatihan kepada para karyawan dapat meminimalisir terjadinya ketimpangan pendapatan. Pekerja yang telah dilatih mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam melakukan pekerjaan dan berpeluang mendapatkan upah yang lebih besar sehingga dapat menurunkan ketimpangan pendapatan.

Peran pemerintah daerah akan sangat penting dalam membentuk kualitas daerah yang pada akhirnya dapat menurunkan ketimpangan pendapatan di berbagai daerah di Pulau Jawa. Adanya alokasi belanja negara di sektor yang tepat seperti pada sektor kesehatan dan pendidikan dengan memberikan bantuan sosial yang lebih tertuju pada masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah akan membantu untuk menurunkan ketimpangan. Melalui bantuan biaya pendidikan, masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih baik sehingga diharapkan akan menaikkan kualitas sumber daya manusia.

Daftar Pustaka

- Alamanda. (2021). The Effect of Economic Growth on Income Inequality: Panel Data Analysis From Fifty Countries. *Info Artha*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.31092/jia.v5i1.1176>
- Alvan, A. (2007). Forging a Link Between Human Development and Income Inequality: A Cross-Country. *Review of Social, Economic & Business Studies*, 7(8), 31–43. <https://www.researchgate.net/publication/201161170>
- Arzaqi, R. S., & Astuti, E. T. (2020). Kajian Ketimpangan Pendapatan Di Jawa Timur Tahun 2010-2017. *Seminar Nasional Official Statistics*, 1, 514–523. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.195>
- BPS. (2022). *Gini Rasio*. <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/999>
- BPS DIY, & Bappeda DIY. (2020). Analisis Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta 2020. *Analisis Ketimpangan Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, 144. <http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/publikasi/detail/30-analisis-ketimpangan-pendapatan-diy-2020>
- Febrianto, R. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Daerah, dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Jawa Timur 2011-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Universitas Bravijaya*, 5(1), 1–13. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3572/3186>
- Hartini, N. T. (2017). Pengaruh PDRB per kapita, Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan antar daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2015. In *eprintsUNY*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Istiqamah, Syaparuddin, & Rahmadi, S. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan (Studi Provinsi-Provinsi di Indonesia). *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(3), 111–126.
- KEMENKO Perekonomian. (2020). *Pemulihan Ekonomi Nasional Jadi Prioritas APBN 2021*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. <https://ekon.go.id/info-sektoral/17/127/berita-pemulihan-ekonomi-nasional-jadi-prioritas-apbn-2021>
- Korimah, I., & Yuniasih, A. F. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan: Implementasi Tujuan SDGs ke-10. *STIS*. https://stis.ac.id/sipadu/pegawai/upload_jurnal/file_1577755199.pdf
- Pradnyadewi, D., & Purbadharmaja, I. B. P. (2017). Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6(2), 255–285.

- Putra, L. A. P. (2018). Analisis Pengaruh TPAK Wanita, PDRB Perkapita, IPM, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009-2016. *Jurnal Imiah Mahasiswa FEB*.
- Rosa, Y. Del, & Sovita, I. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa. *Menara Ekonomi*, 2(4), 41–52.
- SIMREG Bappenas. (2020). *Rasio Gini*. <https://simreg.bappenas.go.id/>
- Syamsir, A., & Rahman, A. (2018). Menelusur Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten dan Kota. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 5(1), 22. <https://doi.org/10.24252/ecc.v5i1.5235>
- Syita, S. (2017). *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi DI Yogyakarta Periode Tahun 2008-2014*. Universitas Islam Indonesia.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasi Disertai Panduan EVIEWS* (5th ed.). UPP STIM YKPN. <https://library.fbe.uui.ac.id/index.php?p=fstream&fid=776&bid=5033>
- World Bank. (2015). *Ketimpangan yang Semakin Lebar*. [http://documents.worldbank.org/curated/en/870151468197336991/pdf/101668-BAHASA-WP-PUBLIC-Box394818B-Executive-Summary-Indonesias-Rising-Divide.pdf](http://documents.worldbank.org/curated/en/870151468197336991/pdf/101668BAHASA-WP-PUBLIC-Box394818B-Executive-Summary-Indonesias-Rising-Divide.pdf)
- Zuhriyah, D. A. (2017). *Angka Ketimpangan Yogyakarta Tetap Paling Tinggi*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20170718/9/672514/angka-ketimpangan-yogyakarta-tetap-paling-tinggi>